

KIPRAH KIAI & PESANTREN DALAM PERGULATAN POLITIK NASIONAL DI INDONESIA

Mir'atul Hayah¹, Nur Fatimatuz Zahro²

E-mail: hayahmiratul02@gmail.com, fatimatuznur83@gmail.com

Abstrak: Discussing the world of politics in Islamic boarding schools seems to be an unusual thing. This unusualness is more because there is a conception of someone who places Islamic boarding schools as mere places for the reproduction of *an-sich* scholarship, separate from the real world (real politics). Even though this is not the case, *pesantren* is a replica of life that combines various life skills, including political skills. Whereas in history in our leadership, *pesantren* at the national level has been prominent in the era of the Japanese occupation. When the Japanese Military Government asked KH. Hasyim Asy'ari to lead *Shumubu* (a kind of Religious Affairs Office) in Jakarta. In August 1945 the Japanese sent Maruto Nitimihardjo to Jombang to ask KH. Hasyim Asy'ari became President of the Republic of Indonesia, but he refused. After that, many students took part at the national level. The peak is when KH. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) was elected President of the Republic of Indonesia. This article focuses on the study of the Gait of *Kiai & Pesantren* in the National Political Struggle in Indonesia. The aim is to analyze political education in Islamic boarding schools as a place for reproduction of ideal leader candidates in Indonesia, with historical evidence that *kiai & pesantren* have been active in political struggles and have taken part in coloring the national political arena in Indonesia, such as: the establishment of *Dar al-Islam*, the Jihad resolution, the appointment of a guardian *al-Amr ad daruru bi asy-Syaukah* for the first president of the Republic of Indonesia, the establishment of the Jakarta Charter Nationalism, and the acceptance of the Single Principle of Pancasila.

Keywords: *Kiai, Pesantren, National Politics*

Pendahuluan

Memperbincangkan dunia politik di pesantren, seolah menjadi hal yang tak lazim. Ketidak laziman ini lebih dikarenakan ada konsepsi seseorang yang menempatkan pensantren hanya sekadar tempat reproduksi keilmuan *an-sich*, terpisah dari dunia nyata (real politik). Padahal tidak demikian, pesantren adalah

¹ Universitas Islam Darussalam (UNIDA) Gontor

² Universitas Trunojoyo Madura (UTM)

eplika kehidupan yang memadu pelbagai kecakapan hidup, tak terkecuali kecapan politik.

Pernyataan kontroversial KH. Said Agil Siraj, Ketua Umum PBNU kian menghangat. "Siapa saja yang mampu dan dipercaya rakyat, pemimpin yang adil meski itu non-Muslim tapi jujur, itu lebih baik daripada pemimpin Muslim tapi zalim. Di mana saja dan siapa saja."³ Ada kemungkinan Pernyataan kontroversial ini berpijak pada pendapat IbnTaymiyyah yang mengatakan: "Allah akan menolong negara yang adil meskipun negara itu kafir. Dan Allah tidak akan menolong negara yang zhalim meskipun negara itu mukmin (Islam)."⁴

Pernyataan kontroversial di atas, seolah menjadi suatu kewajaran ditengah sulitnya menemukan figur pemimpin di Indonesia yang baik. Data Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah mencatat hingga Februari 2015 sebanyak 343 orang dari total 524 orang kepala daerah, dan wakil kepala daerah yang terjerat kasus korupsi.⁵ Ironisnya lagi, mayoritas pelaku tindakan korupsi *notabene* beragama Islam, dan tidak sedikit di antara mereka berasal dari politik berlabel Islam.⁶

Persoalan lain yang tak kalah penting adalah hingga kini partai politik belum mampu melakukan pendidikan politik secara baik. Indikasinya sederhana, disetiap suksesi pemilihan umum mulai dari penjaringan bakal presiden, gubernur, wali kota, bupati, DPR, DPRD I, dan DPRD II, partai politik selalu kesulitan mencari bakal calon. Wal hasil, partai politik merayu bakal calon eksekutif, dan legislatif di luar kader partai, mulai dari kaum akademisi, agamawan, seniman, pengusaha hingga artis papan atas merupakan potret buram kepemimpinan, dan politik di Indonesia. Pilgub DKI Jakarta yang menghadirkan Cagub-Cawagub di luar kader partai politik menjadi bukti nyata dari hal itu.⁷

³ Hardani Triyoga, "Said Aqil: Mending Pemimpin Non-Muslim Tapi Jujur dari pada Muslim Tapi Zalim," *detiknews*, 16 April 2016, 1.

⁴ Agus Sunaryo, "Symbolisme dan Essensialisme Kepemimpinan (Kajian Fikih Siyasah Tentang Sosok Pemimpin Ideal Menurut Islam)," *jurnal AKADEMIKA* 1, Januari 2014, 72.

⁵ Sabrina Asril, "Mendagri: 343 Kepala Daerah Tersangkut Kasus Hukum," *Kompas.com*, 4 Februari 2015.

⁶ "Suryadama Ali, Mantan Menteri Agama, sekaligus sebagai Ketua umum PPP (2007-2014), dan Lutfi Hassan Ishaq, Presiden PKS (2010-2015)," n.d., http://www.kompasiana.com/anugrahoby/_551b3de6a33311b023b65d43dck.

⁷ Anis Baswedan adalah mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nasional dari kalangan akademisi non partai politik dipinang oleh Partai Gerinda, dan PKS untuk menjadi Calon Gubernur (Cagub) DKI Jakarta, dipasangkan dengan Sandiaga Uno, dewan Pembina Partai Gerinda. Cagub Agus Harimurti Yudhoyono dari kalangan militer dipinang oleh Partai Demokrat (PD), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Amanat Nasional (PAN), dipasangkan dengan Sylviana Murni pegawai negeri sipil aktif. Cagub Basuki Tjahaya Purnama berasal dari non partai dilamar oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Golongan Karya (Gorkar), Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), dan Partai Nasional Demokrat (Nasdem) dipasangkan dengan Djarot Saiful Hidayat, pengurus partai PDIP.

Padahal dalam sejarah, kepemimpinan kiai pesantren di tingkat nasional telah menonjol di era pendudukan Jepang saat Pemerintahan Militer Jepang meminta KH. Hasyim Asy'ari untuk memimpin *Shumubu* (semacam Kantor Urusan Agama) di Jakarta. Jepang meminta Kiai Hasyim memimpin *Shumubu* karena memahami bahwa NU adalah organisasi Islam terbesar di Jawa. Bahkan pada Agustus 1945 pihak Jepang mengutus Maruto Nitimihardjo ke Jombang untuk meminta KH. Hasyim Asy'ari menjadi Presiden RI, tetapi beliau menolak dan atas saran KH.A. Wahid Hasyim, beliau mendukung Bung Karno dan Bung Hatta. Setelah itu, banyak santri (sebagai tokoh dari pesantren) yang berkiprah di tingkat nasional seperti KH.A. Wahid Hasyim, dan KH. Idham Chalid. Puncaknya ialah saat KH. Abdurrahman wahid (Gus Dur) terpilih menjadi Presiden RI.

Artikel ini difokuskan pada kajian Kiprah Kiai & Pesantren Dalam Pergulatan Politik Nasional Di Indonesia. Dimulai dengan kajian Definisi Santri, Kiai dan Pesantren, Relasi Antara Islam dan Politik, Pondok Pesantren dan dasar-dasar Pendidikan Politik Pesantren, dan kajian tentang Kiprah Kiai & Pesantren Dalam Pergulatan Politik Nasional Di Indonesia.

Tujuan artikel ini adalah untuk menganalisa Pendidikan politik di pondok pesantren sebagai salah satu tempat reproduksi calon pemimpin ideal di Indonesia, dengan bukti sejarah bahwa kiai & Pesantren telah berkiprah dalam pergulatan politik dan ikut andil dalam mewarnai percaturan politik Nasional di Indonesia. Di antara kiprahnya adalah penetapan *Dar al-Islam*, resolusi Jihad, penetapan *wali al-Amr ad daruru bi asy-Syaukah* untuk presiden pertama RI, pembentukan Nasionalisme Piagam Jakarta, dan penerimaan Asas Tunggal pancasila.

Definisi Santri, Kiai & Pesantren

Istilah santri berasal dari kata *shastra* atau *shastri* dari bahasa Tamil yang berarti seorang ahli buku suci (Hindu). Sumber lain menyatakan, santri berarti orang baik yang suka menolong.⁸ Menurut Nurcholis Madjid, kata santri berasal dari istilah sansekerta *sastri* yang berarti melek huruf, atau dari bahasa Jawa *cantrik* yang berarti orang yang mengikuti kemanapun gurunya pergi. Melalui istilah santri inilah kemudian muncul istilah pesantren, yang merupakan tempat di mana para santri belajar dan digembleng.⁹

Menurut Marzuki Wahid, santri adalah seseorang yang mempunyai tiga ciri-ciri utama yaitu : 1) peduli terhadap kewajiban *ainiyah* (*ihitimam bi al-furud al-ainiyah*), 2) menjaga hubungan yang baik dengan *al-khaliq* (*khusnu al-mu'amalah ma'a al-khaliq*), 3) menjaga hubungan yang baik dengan sesama makhluk (*khusnu al-mu'amalah ma'a al-khalqi*).¹⁰ Menurut Husnan Bay Fananie, santri adalah siswa

⁸ Abu Hamid dalam H. M Yacub, *Pondok Pesantren dan Pembangunan Masyarakat Desa*, (Bandung: Angkasa, 1993), 65.

⁹ Nurcholis Madjid, *Bilik-bilik Pesantren*, (Jakarta: Paramadina, 1997), 27.

¹⁰ Marzuki Wahid dkk, *Pesantren Masa Depan*, (Bandung: Pustaka Hidayah, 1999), 90.

yang tinggal di pondok pesantren yang mempelajari agama secara serius dan belajar kepada kiai.¹¹

Dalam perkembangan selanjutnya, ada beberapa tipologi santri. Menurut para ahli santri dapat dikelompokkan dalam dua kelompok besar, yaitu: *Pertama, Santri mukim*, yaitu murid-murid yang berasal dari daerah yang jauh dan menetap dalam kelompok pesantren. Santri mukim yang paling lama tinggal di pesantren biasanya kelompok yang memegang tanggung jawab mengurus kepentingan pesantren sehari-hari, mereka juga memikul tanggung jawab mengajar santri-santri muda tentang kitab-kitab dasar dan menengah. *Kedua, Santri kalong*, yaitu murid-murid yang berasal dari daerah sekeliling pesantren, yang biasanya tidak menetap dalam pesantren. Untuk mengikuti pelajaran di pesantren, mereka bolak-balik (*nglajo*) dari rumahnya sendiri. Biasanya perbedaan antara pesantren besar dan pesantren kecil dapat dilihat dari komposisi santri kalong.¹²

Adapun kyai, menurut asal usul perkataannya (kyai) dalam bahasa Jawa dipahami untuk tiga jenis yang berbeda. *Pertama*, sebagai gelar kehormatan bagi barang-barang yang dianggap keramat, seperti *kyai Garuda Kencana* dipakai untuk sebutan kepada emas yang ada di Keraton Yogyakarta. *Kedua*, gelar kehormatan untuk orang-orang tua pada umumnya. *Ketiga*, gelar yang diberikan oleh masyarakat pada ahli agama Islam yang menjadi pemimpin pesantren dan mengajarkan kitab-kitab Islam klasik kepada para santrinya.¹³

Menurut Karel A Steenbrink, kyai adalah guru agama Islam yang memimpin salah satu pondok pesantren di wilayah tertentu dan dalam lingkup yang utuh dan bebas tidak tergantung pada siapapun. Hal senada dipaparkan Saifuddin Zuhri bahwa kyai adalah seorang yang mempunyai keahlian dalam agama Islam, yang dimuliakan orang dan berpengaruh dalam masyarakat.¹⁴

Para kyai dengan kelebihan dalam pengetahuan agama Islam dianggap sebagai seorang yang senantiasa dapat memahami keagungan Tuhan dan rahasia alam. Dengan demikian, mereka dianggap memiliki kedudukan yang tak terjangkau terutama oleh kebanyakan orang awam. Dalam beberapa hal, mereka menunjukkan kekhususannya dalam bentuk-bentuk pakaian yang merupakan simbol kealiman yaitu kopiyah dan surban.¹⁵

Dalam *Ensiklopedi Islam* disebutkan bahwa kiai adalah orang yang dianggap menguasai ilmu agama Islam dan mengelola serta mengasuh pondok pesantren. Di antara kyai tersebut ada yang menjadi pemimpin tarekat yang banyak berperan

¹¹ Husnan Bay Fananie, *Modernism in Islamic Education in Indonesia and India ; A Case Study of The Pondok Pesantren Modern Gontor and Algarh*, (Nedherlad: Leiden University, 1998), 112.

¹² Haedar Putra Dauly, *Historisitas dan Eksistensi Pesantren, Sekolah dan Madrasah*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2001), 15.

¹³ Zamakhsyari Dhofier, *Tradisi Pesantren: Studi Tentang Pandangan Hidup Kyai*, (Jakarta: LP3ES, 1985), 55.

¹⁴ Karel A Steenbrink, *Pesantren, Madrasah Dan Sekolah*, (Jakarta : LP3S ,1986), 107.

¹⁵ Wan Mohd Wan, *Filsafat dan Praktik Pendidikan Islam Syed M. Naquib Al-Attas*, terj. Hamid Fahmy Zarkasyi, (Bandung: Mizan, 1998), 66.

dalam penyebaran Islam di Jawa. Sebutan kyai diberikan kepada orang-orang yang menguasai ilmu agama, mempunyai kewibawaan yang muncul dari pribadinya, serta sangat berpengaruh baik dalam lingkup regional maupun nasional.¹⁶

Pesantren sendiri mempunyai akar yang kuat dalam sejarah perkembangan Islam di Indonesia. Kata pesantren yang berasal dari akar kata *santri* dengan awalan *pe* dan akhiran *an*, berarti tempat tinggal para santri. Pesantren pada dasarnya adalah sebuah asrama pendidikan Islam tradisional, para siswanya tinggal bersama dan belajar ilmu-ilmu keagamaan di bawah bimbingan seorang kyai. Asrama siswa berada dalam kompleks pesantren dimana kyai bertempat tinggal. Disamping itu ada fasilitas ibadah berupa masjid. Biasanya kompleks pesantren dikelilingi dengan tembok untuk mengawasi arus keluar masuknya santri.¹⁷

Pondok Pesantren dikenal di Indonesia sejak zaman Walisongo sebagai salah satu tempat berlangsungnya intraksi antara guru dan murid, kiyai dan santri dalam intensitas yang relatif dalam rangka mentransfer ilmu-ilmu keislaman dan pengalaman.¹⁸ Pondok, Masjid, santri, kyai dan pengajaran kitab-kitab klasik merupakan lima elemen dasar yang dapat menjelaskan secara sederhana apa sesungguhnya hakikat pesantren. Dengan demikian, pesantren merupakan sebuah lembaga pendidikan Islam yang menampung sejumlah santri maupun santriwati dalam rangka mempelajari ilmu-ilmu agama di bawah bimbingan seorang kyai.¹⁹

Relasi Antara Islam dan Politik

Islam adalah *dīn* (agama), sekaligus *dawlah* (negara).²⁰ Menurut Munawir Sjadzali terdapat tiga aliran di kalangan umat Islam dalam melihat Islam dan politik. *Pertama*, aliran yang berpendapat bahwa Islam bukan semata-mata agama dalam pengertian Barat, yang hanya menyangkut hubungan antara manusia dan Tuhan, melainkan Islam adalah satu agama yang sempurna, dan lengkap dengan pengaturan bagi segala aspek kehidupan manusia termasuk kehidupan bernegara. *Kedua*, aliran yang berpendapat bahwa Islam adalah agama dalam pengertian Barat, yang tidak ada hubungannya dengan urusan kenegaraan. *Ketiga*, aliran yang menolak pendapat bahwa Islam adalah suatu agama yang serba lengkap, dan Islam terdapat di dalam sistem kenegaraan. Akan tetapi, aliran ini menolak anggapan bahwa Islam adalah agama dalam pengertian Barat yang hanya mengatur hubungan antara manusia, dan Tuhannya. Aliran ini berpendapat bahwa dalam Islam tidak

¹⁶ *Ensiklopedi Islam*, Jilid 3, (Jakarta : Ikhtiar Baru Van Hoeve, 2000), 10.

¹⁷ Said Agil Syiraj dkk, *Pesantren Masa Depan, Wacana Pemberdayaan dan Transformasi Pesantren*, (Bandung: Pustaka Hidayah, 1999), 85.

¹⁸ Fatah Ismail, *Dinamika Pesantren dan Madrasah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), 25.

¹⁹ Abuddin Nata (editor), *Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan Lembaga-lembaga Pendidikan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Grasindo, 2001), 42.

²⁰ Budhy Munawar Rahman, *Ensiklopedi Nurcholish Madjid Pemikiran Islam Di Kanvas Peradaban*, (Jakarta: Penerbit Mizan, 2006), 2719–2720.

terdapat sistem ketatanegaraan, tetapi terdapat seperangkat tata nilai etika bagi kehidupan bernegara.²¹

Di sisi yang lain, Azyumardi Azra membagi pertautan antara Islam dan agama menjadi tiga. *Pertama*, pemisahan antara agama, dan politik. Kondisi seperti ini biasanya disertai dengan ideologi politik sekuler yang tidak bersahabat dengan agama (*religiously unfriendly secularism*). Kedua, pemisahan yang disertai ideologi yang bersahabat dengan agama (*religiously friendly ideology*), seperti di Indonesia. Penyebutannya biasa disebut sebagai akomodasi antara negara, dan agama. *Ketiga*, penyatuan agama, dan negara, seperti Arab Saudi yang dapat disebut teokrasi.²²

Bila ditinjau kembali, pandangan Munawir Sjadzali dan Azyumardi Azra pada hakikatnya saling menguatkan yang menempatkan Islam, dan politik sebagai satu dimensi pemikiran. Masing-masing orang dapat melihat, dan menempatkan Islam dan politik dalam satu garis pijakan, ataupun sebaliknya, tinggal memilih mana yang dijadikan rujukan.

Secara historis, hubungan antara Islam dan politik dimulai sejak awal kelahiran Islam itu sendiri. Meskipun hubungan antara agama, dan negara (politik) tidak pernah terlontar di zaman Nabi, dan Khulafa' al-Rasyidin. Hal itu dikarenakan di masa-masa itu seluruh waktu dan tenaga dicurahkan untuk menyebarkan dan membela Islam.²³ Akan tetapi, Nabi Muhammad diyakini oleh umatnya bukan hanya sekadar seorang nabi, melainkan juga seorang negarawan. Islam dan politik pada dasarnya tidak terpisahkan. Islam tidak pernah memisahkan antara kegiatan profan, dan sakral, kecuali dalam pendekatannya. Artinya liputan Islam kepada segenap persoalan hidup, misalnya politik, sebenarnya terjadi terutama hanya pada level etisnya saja. Islam tidak pernah memberi detail-detail berpolitik. Ijtihad para pelaku politik menjadi kuncinya dengan memegang teguh prinsip-prinsip Islam.²⁴

Relasi antara Islam dan politik biasanya merujuk pada peristiwa di Thāqifah Banī Sa'īdah. Pada peristiwa itu ditetapkan kriteria pengangkatan Khulafā al-Rāsīdīn. Inilah dasar yang dijadikan tonggak ulama fiqih Sunni menjelaskan hubungan agama, dan negara. Para kritikus Islam berpendapat bahwa pertemuan yang dihelat di Thāqifah Banī Sa'īdah dinilai tidak direncanakan dengan matang, tergesa-gesa, dan tidak memiliki dasar teologis yang kuat. Apalagi tidak semua unsur sahabat penting hadir dalam musyawarah tersebut.²⁵

²¹ Amirullah, "Hubungan Islam, dan Politik di Indonesia Serta Implikasinya Terhadap Pendidikan Islam," *Jurnal Kreatif*, XII, no. 1, Januari 2015, 5.

²² Arfiansyah, "Pemikiran Politik Islam; Sebuah Tinjauan Sejarah Terhadap Arus Pemikiran Islam Klasik Sampai Awal Abad Ke 20," *jurnal SUBSTANTIA*, 12, Oktober 2010, 174.

²³ Muhammad Abid Aljabiri, *Agama, Negara, dan Penerapan Syariah*, terj. Mujiburrahman, (Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru, 2001), 14.

²⁴ M. Arkoun dan Louis Gardet, *Islam Kemarin, dan Hari Esok*, terj. Mujiburrahman, (Bandung: Penerbit Pustaka, 1997), 5.

²⁵ Thaqifah Bani Sa'īdah merupakan balai pertemuan orang ansar dan muhajirin untuk membahas kepemimpinan umat islam setelah nabi muhammad saw meninggal, Abdul Chalik, 126

Dalam kisah Nabi-nabi terdahulu, manusia sudah mengenal sistem pemerintahan, seperti zaman Nabi Ibrahim dengan raja Namrudz yang terkenal lalim. Kemudian ketersingungan itu berlanjut secara terus menerus pada masa kepemimpinan Nabi Muhammad, Khulafā al-Rāshidīn, tābīin, tābī' al-tābī'īn hingga sekarang. Dalam konteks keindonesiaan, hubungan Islam, dan politik menyatu padu, tak terpisahkan, seperti dua sisi mata uang. Catatan-catatan historis menyebutkan bahwa hubungan antara Islam, dan politik dimulai sejak masuknya Islam di nusantara hingga sekarang. Bahkan taktik dan strategi para wali songo dalam menyemaikan dan menyebarkan agama Islam di nusantara kala itu juga menggunakan politik sebagai salah satu alat dakwahnya.²⁶

Potret kelekatan Islam, dan politik di Indonesia secara eksplisit ditunjukkan dengan adanya istilah Islam politik, dan Islam kultural pada dekade 80-an. Islam politik yang dimaksud adalah Islam yang memiliki orientasi kuat kepada politik dan kekuasaan, sedangkan Islam kultural adalah Islam yang memiliki orientasi kepada pengembangan aspek sosio-kultural dari jalur non politik seperti dakwah secara damai, pendidikan, dan ekonomi. Sebagai contoh real, para elit organisasi keagamaan seperti Muhammadiyah, dan NU acapkali mempraktikkan peranan Islam politik dan Islam kultural secara bergantian.²⁷

KH. Wahab Chasbullah pernah melontarkan pendapat bahwa "Islam, dan politik ibarat gula, dan manisnya."²⁸ Dengan demikian, Islam, dan politik di Indonesia, baik dilihat dalam tataran historis, sosiologis, maupun praksis merupakan dua kesatuan yang saling melekat, keduanya tak bisa dipisahkan antara satu dengan lainnya.

Pondok Pesantren dan Pendidikan Politik

Pondok Pesantren sebagai sub sistem pendidikan nasional hingga kini tetap diyakini sebagai salah satu pendidikan yang terbaik di Indonesia. Keberadaan pondok pesantren tetap mendapat tempat tersendiri di hati umat Islam. Lebih-lebih bagi warga masyarakat nahdhiyin. Bahkan, tidak sedikit masyarakat muslim puritan menganggap pendidikan pondok pesantren sama pentingnya dengan pendidikan formal. Di pondok pesantren, para santri tidak hanya mendapatkan ilmu agama Islam, budaya literasi, manajemen diri, kecapan hidup (*life skill*), ilmu etika, bahkan dasar-dasar politik juga diperoleh.²⁹

"Fundamentalisme dan Masa Depan Ideologi Politik Islam," *Jurnal Islamica Junal Studi Keislaman*, Juli 2018, 62.

²⁶ Triono, "Corak Pemikiran Politik dalam Islam Zaman Klasik, Pertengahan dan Kontemporer," *Jurnal TAPIS*, Juli 2011, 33.

²⁷ Azyumardi Azra, "Revitalisasi Islam Politik dan Islam Kultural di Indonesia," *Indo-Islamika*, 1, Februari, 2012, 235.

²⁸ Greg Fealy dan Greg Barton, *Tradisionaisme Radikal Persinggungan Nahdlatul Ulama-Negara*, (Yogyakarta: LKiS, 2010), 22.

²⁹ Mukodi, *Menjaga Umat Pilar-Pilar Budaya Pondok Tremas di Era Global*, (Yogyakarta: Lentera Kresindo, 2015), v.

Pendidikan politik adalah salah satu ragam pendidikan yang dibangun, dan ditumbuhkembangkan di pondok pesantren. Akan tetapi, cara dan metodenya tidak terdesain secara baik. Pelbagai aktivitas yang mengarah pada pendidikan dasar-dasar politik seperti kebebasan menyampaikan pendapat, menghargai perbedaan, toleransi, dan budaya telah terpraktikkan di pesantren.

Setidaknya ada lima aktifitas di pondok pesantren yang mengkondisikan para santri memahami nilai-nilai politik, yakni: 1) forum diskusi kitab kuning; 2) kajian *al-Fiqh 'alā al-Madhāhib al-Arba'ah*; 3) forum *khiṭābiyah* (orasi ilmiah); 4) praktik budaya demokrasi; 5) kajian *bath al-masāil* sebagaimana berikut:

Forum Diskusi Kitab Kuning

Arena diskursus akademik tumbuh kembang dengan subur di pondok pesantren melalui aktifitas musyawarah kitab kuning. Budaya *shāwir*, atau musyawarah adalah tradisi diskusi mendalam mengenai topik pembahasan. Diskusi ini bersifat dinamis, dan tak jarang terdapat dialektika ilmiah serta perdebatan akademik yang terjadi antar peserta musyawarah. Forum musyawarah kitab kuning biasanya dihelat melalui dua ranah, yakni diranah musyawarah reguler yang diatur dan didesain oleh pengurus pesantren; dan diranah musyawarah insidental yang diinisiasi oleh masing-masing tingkatan dan organisasi kedaerahan asal santri secara mandiri.³⁰

Topik diskusi biasanya menyesuaikan konsensus peserta diskusi. Adakala mendiskusikan pokok-pokok pengajaran yang sulit. Adakala mendiskusikan tema-tema aktual seperti masalah hak, dan kewajiban warga terhadap negara, relasi agama, dan negara, masalah kepemimpinan, dan lain sebagainya. Tesis, anti tesis, dan sintesis menjadi bumbu penyedap diarena diskusi disetiap topik yang diangkat. Pelbagai kitab referensi ditunjukkan dan dibaca sebagai penguat argumentasi. Setiap santri dididik menjadi orator, presenter, sekalaigus debater. Hanya saja ciri khas diskusi di pondok pesantren mendudukan sumber referensi terkuat (*jumhūr 'ulamā'*) sebagai pemenang, bukan pada kehebatan logika nalar presenter, atau debater.

Kontruksi pemikiran yang menonjolkan referensi al-Quran, hadis, dan kitab kuning dan memalingkan' logika pernah dikritik pedas oleh Ulil Abshar Abdalla dengan mengatakan bahwa tradisi epistemologi-keilmuan kitab kuning yang dimiliki oleh pesantren selama ini masih berpusat pada pola pemikiran ahl al-hadīth, bukan pola ahl ra'yu. Tradisi pemikiran pertama ini menjadikan aspek transmisi (riwayat) sebagai kecenderungan dalam mengkaji, dan memecahkan (salving) suatu masalah. Sementara aspek rasionalitas kurang mempunyai *bargaining position*. Oleh karena itu, kritik atas teks sangat berpeluang untuk

³⁰ Helmy Faishal Zaini, *Pesantren Akar Pendidikan Islam Nusantara*, (Jakarta: P3M, 2015), 44.

ditabukan. Belakangan ini, kaum santri mulai memadu, dan menyeimbangkan antara ahl al-hadīth, dan ahl ra'yu, antara teks, dan konteks.³¹

Kajian *al-Fiqh 'alā al-Madhāhib al-Arba'ah*

Kajian *al-Fiqh 'alā al-Madhāhib al-Arba'ah* menjadi salah satu menu akademik tingkat tinggi bagi para santri senior. Dalam *al-Fiqh 'alā al-Madhāhib al-Arba'ah* ini disuguhkan pelbagai persoalan sekaligus pembahasannya dari perspektif Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Safi'i, Imam Hambali, dan para pendukungnya masing-masing. Pendidikan politik didapatkan para santri pada saat mengkaji pokok kajian hukum, kenegaraan, dan hak asasi manusia.

Pokok pembahasan *bunghat* contohnya sebagai salah satu kajian politik Islam menjadi salah satu isu paling aktual dikalangan para santri pada saat KH. Abdurrahman Wahid akan, sedang, dan telah dilenserkan oleh DPR pada Juni hingga Agustus 2001. Sidang Istimewa MPR yang membuahkan *impeachment* kepada Presiden ke-4 Republik Indonesia, KH. Abdurrahman Wahid (Gus Dur). Pembahasan *bunghat* menjadi salah satu topik yang seksi, sekaligus fenomenal di pesantren. Peristiwa *impeachment* yang dilakukan oleh MPR kepada Gus Dur menyadarkan dan memantik dunia pesantren untuk memahami lebih mendalam tentang dunia politik. Diskursus para santri dalam memahami *bunghat* menurut *al-Fiqh 'alā al-Madhāhib al-Arba'ah* dapat terangkum sebagai berikut:

“Menurut Ulama Hanafiyah, *al-bāghī* adalah orang yang keluar dari ketaatan kepada imam yang hak dengan tanpa hak. Di sisi yang lain, Ulama Malikiyah berpendapat bahwa *al-baḡhyū* adalah mencegah diri untuk mentaati orang yang telah sah menjadi imam (khalifah) dalam perkara bukan maksiat dengan menggunakan kekuatan fisik (*mughālabah*), walaupun karena alasan ta'wīl (penafsiran agama). Ulama Syafi'iyah berpendapat *bunghat* adalah kaum muslimin yang menyalahi imam dengan jalan memberontak kepadanya, tidak mentaatinya, atau mencegah hak yang seharusnya wajib mereka tunaikan (kepada imam), dengan syarat mereka mempunyai kekuatan (*shawkah*), ta'wīl, dan pemimpin yang ditaati (*muthā'*) dalam kelompok tersebut. Sementara itu, menurut Ulama Hanabilah *bunghat* diartikan orang-orang memberontak kepada seorang imam –walaupun ia bukan imam yang adil– dengan suatu ta'wīl yang diperbolehkan (*ta'wīl sā'igh*), mempunyai kekuatan (*shawkah*), meskipun tidak mempunyai pemimpin yang ditaati di antara mereka.”³²

Dengan demikian, kajian ta'wīl di pelbagai pondok pesantren di Indonesia diyakini dapat menumbuhkembangkan *sense of politic* para santri. Lebih dari itu, dapat mendidik dasar-dasar politik dalam hati sanubari para santri. Apalagi, topik-topiknya terkait dengan pembahasan kepemimpinan, kebangsaan, dan hak warga terhadap negara.

³¹ Helmy Faishal Zaini, *Pesantren Akar Pendidikan Islam Nusantara*, (Jakarta: P3M, 2015), 50.

³² M. Shiddiq Al-Jawi, “Bughat (pemberontak) dalam Khazanah Fiqih Islam,” n.d., www.fiqihunikabogor.com.

Forum *Khithābiyah*

Forum *khithābiyah* (orasi ilmiah) merupakan ajang kontestasi akademik para santri untuk berproses menjadi (*learning to be*), dan menggelar ilmu yang mereka peroleh. Tak sedikit materi orasi ilmiah (*khithābiyah*) mengkritisi persoalan kebijakan pemerintahan dan perpolitikan tanah air. Di area inilah para santri mendapatkan pendidikan politik secara alami, tanpa didesain, maupun diprogram terlebih dahulu. Tatkala para santri kembali ke kampung halaman mereka masing-masing tidak sedikit diantara mereka yang terlibat ke dalam politik praktis, baik berkecimpung dalam partai politik Islam, maupun partai politik non Islam.

Forum *khithābiyah* juga memantik para santri berfikir kritis terhadap isu-isu aktual perpolitikan nasional dan internasional. Obrolan khas ala santri di kamar-kamar asrama pasca *khithābiyah* seringkali terjadi. Utamanya, menyangkut isu aktual, dan krusial kenegaraan. Bahkan, di beberapa pondok pesantren modern, topik politik menjadi salah satu topik yang seksi, diminati para santri di ajang *khithābiyah*. Hal ini memperjelas bahwa pondok pesantren tidak lagi menutup diri, *tajarrud*, dan anti realitas. Akan tetapi, ia mejadi salah satu tumpuhan yang bisa dijadikan pilihan dalam pembanguan bangsa.³³

Parktik Budaya Demokrasi

Kebebasan berpendapat dan menentukan pilihan menjadi ciri utama demokrasi yang telah dipraktikkan menahun di pelbagai pondok pesantren di Indonesia. Tercermin dari cara santri memilih guru, dan kitab kuning pada saat *bandongan* atau *wetonan*.³⁴ Kondisi ini sama halnya dengan Sistem Kredit Semester (SKS) pada dunia perkuliahan di perguruan tinggi. Kebebasan berpendapat, bersikap, dan berbuat juga dipraktikkan oleh para santri dalam keseharian. Walau budaya *patronclient* di pondok pesantren masih ada, namun kualitasnya mulai menurun sehingga para santri lebih independen dalam bersikap, berpendapat, dan bertindak.³⁵

Gambaran kebebasan berpendapat (demokrasi) diilustrasikan Mukodi dalam temuan disertasinya di Pondok Tremas, bahwa Budaya kebebasan berpendapat merupakan kekhasan Pondok Tremas. Menurut penuturan sebagian santri senior

³³ KH. Wahab Chasbullah, "Syirkatul 'Inan Murabathoh Nadlatul Tujjar," dalam Kumpulan Tulisan Majma' Buhuts An-Nahdliyyah (Forum Kajian Ke-Nu-An) (Pati: Majma' Buhuts AnNahdliyah, 2014), 4.

³⁴ Sistem *wetonan* merupakan metode pengajaran di mana santri mengikuti pelajaran dengan duduk di sekeliling kiai yang membacakan kitab tertentu, santri menyimak kitab masing-masing dan membuat catatan-catatan. Disebut dengan istilah *wetonan*, berasal dari kata *wektu* (istilah jawa untuk kata: waktu), karena pelajaran itu disampaikan pada waktu-waktu tertentu seperti sebelum atau sesudah shalat fardhu yang lima atau pada hari-hari tertentu. Mukodi, *Menjaga Umat Pilar-Pilar Budaya Pondok Tremas di Era Global*, (Universitas Negeri Yogyakarta, 2014), 61.

³⁵ Teori ini dipopulerkan oleh James C. Scott dalam penelitiannya. James C. Scott, *Patron-client politics and political change in southeast Asia*, *jurnal American Political Science Association*, vol. no. 1, mar, 1972, 66.

dan dewan asatidz bahwa KH. Fuad, dan KH. Lukman sebagai pengelola, sekaligus pengasuh Pondok Tremas senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai kebebasan berpikir. Misalnya pada saat rapat dewan guru (*musyawarah akbar*) dalam pembahasan kurikulum, *bath al-masāil*, rapat dewan ma'arif pesantren, rapat wali santri, dan rapat pelbagai hal tentang kemaslahatan Pondok Tremas, hampir dapat dipastikan tidak ada dominasi ide dan gagasan dari sang kiai, semuanya diserahkan kepada peserta sidang musyawarah, sehingga pelaksanaan rapat berjalan secara natural, penuh makna, serta mengedepankan kemaslahatan santri dan pesantren.³⁶

Kajian *Bath Masāil*

Pendidikan politik yang didapatkan para santri dalam kajian *bath al-masāil* sangat beragam dan kenyal makna. Setiap pokok bahasan *bath al-masāil* berbasis pada persoalan sosial kemasyarakatan. Persoalan kebangsaan, bela negara, dan politik nasional merupakan deret persoalan yang acapkali dicarikan solusi dalam kajian *bath al-masāil*.³⁷ Sebagai contoh pembahasan *bath al-masāil* pada Mukhtamar NU ke-33 di Jombang Jawa Timur adalah Persoalan pemakzulan (pemberhentian) pemimpin sebagai berikut:

Pertanyaannya: apa sebab-sebab pemimpin boleh diberhentikan? Jika seorang pemimpin telah melakukan hal-hal yang menyebabkan ia bisa diberhentikan, bagaimana proses tahapan pemberhentiannya? Jawabannya, mayoritas ulama berpendapat bahwa tidak ada penyebab yang menjadikan pemimpin dapat diberhentikan kecuali jika ia nyata-nyata melanggar konstitusi; Apabila telah terbukti bersalah dan ditetapkan secara hukum, maka pemimpin boleh dimakzulkan dengan cara: (a) direkomendasikan untuk mengundurkan diri; (b) apabila tidak mau mengundurkan diri dan tidak mau bertaubat, maka ia bisa dimakzulkan dengan aturan yang konstitusional selama tidak menimbulkan madharat yang lebih besar. Apabila pemimpin telah terbukti dan ditetapkan secara hukum melakukan hal-hal yang menyebabkannya dapat diberhentikan, maka proses tahapan pemberhentiannya sesuai dengan konstitusi yang berlaku.³⁸

Melalui kajian *bath al-masāil*, segenap civitas akademika pondok pesantren, mulai dari kiai, keluarga kiai, pengelola, pengurus, ustad, abdi dalem dan santri dapat belajar dan memahami persoalan politik secara mendalam. Selain itu, kajian *bath al-masāil* pada persoalan politik juga memantik *sense of politic*, kesadaran politik bagi para santri di pondok pesantren. Keikutsertaan dan keaktifan sivitas pondok pesantren dalam mengikuti pelbagai pembahasan *bath al-masāil* khususnya dalam topik-topik politik dapat mengkondisikan mereka secara *unconsciousness*

³⁶ Mukodi, *Studi Fenomenologi Budaya Pondok Tremas di Era Globalisasi*, (Universitas Negeri Yogyakarta, 2014), 162.

³⁷ Mukodi, *Studi Fenomenologi Budaya Pondok Tremas di Era Globalisasi*, (Universitas Negeri Yogyakarta, 2014), 162.

³⁸ "Hasil Bahtsul Masail Mukhtamar NU ke-33 di Jombang," Bahtsul Masail, 24 Agustus 2015, santri.net.

pada ranah politik. Dikemudian hari, mereka tidak lagi alergi dengan praktik-praktik politik di masyarakat, bahkan menjadikan politik sebagai bagian dari alat dakwah.³⁹

Kiprah Kiai & Pesantren Dalam Pergulatan Politik Nasional Di Indonesia

Pesantren mempunyai akar yang kuat dalam sejarah perkembangan Islam di Indonesia. Para sejarawan memandang bahwa keberadaan pesantren tidak lepas dari peran Walisongo, figur penyebar agama Islam di Jawa.⁴⁰ Walisongo punya peran besar dalam pengembangan ajaran Islam, yang secara tradisional terlembagakan melalui lembaga pendidikan Islam tradisional. Pesantren Ampel merupakan cikal bakal berdirinya pesantren-pesantren di Tanah Air.⁴¹

Dinamika pesantren dipahami Azyumardi Azra sebagai fungsi kelembagaan yang memiliki tiga peranan pokok. *Pertama*, transmisi ilmu pengetahuan Islam. *Kedua*, pemeliharaan tradisi Islam. *Ketiga*, pembinaan calon-calon ulama. Keilmuan pesantren lebih mengutamakan penanaman ilmu dari pada pengembangan ilmu. Hal ini terlihat pada tradisi pendidikan pesantren yang cenderung mengutamakan hafalan dalam transformasi keilmuan di pesantren.⁴²

Adapun Tradisi pesantren yang memiliki keterkaitan dan keakraban dengan masyarakat lingkungan diharapkan dapat menciptakan suatu proses pendidikan tinggi yang melibatkan seluruh anggota masyarakat. Dengan demikian terciptalah masyarakat belajar, sehingga ada hubungan timbal balik antar keduanya. Di sini masyarakat telah berperan serta dalam pendidikan di pesantren, sehingga pesantren dapat memahami masalah-masalah yang dihadapi masyarakat untuk mencari alternatif pemecahannya.⁴³

Dalam perjalanan sejarah, pesantren telah berkiprah di tingkat nasional pada era pendudukan Jepang. Pemerintahan Militer Jepang meminta KH. Hasyim Asy'ari untuk memimpin *Shumubu* (semacam Kantor Urusan Agama) di Jakarta karena Jepang memahami bahwa NU adalah organisasi Islam terbesar di Jawa. Pada Agustus 1945, pihak Jepang mengutus Maruto Nitimihardjo ke Jombang untuk meminta KH. Hasyim Asy'ari menjadi Presiden RI, tetapi beliau menolak. Atas saran KH. A. Wahid Hasyim, beliau mendukung Bung Karno dan Bung Hatta menjadi Presiden RI. Setelah itu, banyak santri (sebagai tokoh dari pesantren) yang berkiprah di tingkat nasional seperti KH.A. Wahid Hasyim, dan KH. Idham Chalid.

³⁹ Abdul Munir Mulkhan, *Runtuhnya Mitos Politik Santri Strategi Kebudayaan dalam Islam*, (Yogyakarta: Sypress, 1999), 115.

⁴⁰ Abdurrahman Mas'ud dkk., *Dinamika Pesantren dan Madrasah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), 4.

⁴¹ Zamakhsyari Dhofier, *Tradisi Pesantren: Studi Tentang Pandangan Hidup Kyai*, (Jakarta: LP3ES, 1985), 41.

⁴² Azyumardi Azra, *Esai-Esai Intelektual Muslim Pendidikan Islam*, (Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 1999), 89.

⁴³ Zamakhsyari Dhofir, *Tradisi Pesantren: Studi Tentang Pandangan Hidup Kiai*, (Jakarta: LP3ES, 1985), 51-52.

Puncaknya ialah saat KH. Abdurrahman wahid (Gus Dur) terpilih menjadi Presiden RI.

Di antara kiprah pesanten dalam pergulatan dan percaturan politik Nasional di Indonesia adalah:

a. Penetapan *Dar al-Islam*

Melalui muktamar NU XI tahun 1938 di Banjarmasin, Para Ulama dan kiai pesantren memutuskan bahwa negara dan tanah air wajib dijaga menurut fiqih. Hal ini berdasar pada persoalan status negara Indonesia dalam perspektif syariah. Berpedoman pada kitab *Bughyah al-Murtasyidin*, Mukhtamar memutuskan bahwa sesungguhnya negara Indonesia merupakan negara Islam (*dar al-Islam*). Dalam tradisi fiqih politik, dikenal tiga jenis negara, yakni: *dar al-Islam* (negara Islam), *dar al-sulh* (negara damai) dan *dar al-harb* (negara perang). Konsepsi bentuk negara Islam menuntut untuk dipertahankannya negara dari serangan luar, karena merupakan perwujudan normatif dan fungsional dari cita-cita negara.

Argumentasi yang digunakan, wilayah Nusantara, khususnya tanah Jawa pernah dikuasai sepenuhnya oleh umat Islam melalui kerajaan-kerajaan Islam. Meski pernah dijajah, namun mayoritas penduduk negara yang muslim, diberikan kebebasan menjalankan syariat agama menjadi dasar lain penetapan negara Islam ini. Selain itu, keberadaan lembaga kepenghuluan yang memungkinkan umat Islam menjalankan syariat, menjadi alasan keputusan muktamar. Keputusan muktamar ini pada dasarnya merupakan langkah awal pesantren dalam berpolitik meski saat itu masih dalam kekuasaan penjajahan.

Dampak dari penetapan negara Islam (*dar al-Islam*) adalah memberikan legitimasi bagi bangsa Indonesia berjuang secara aktif dalam kemerdekaan. Cita-cita mewujudkan kemerdekaan secara tersirat dan pasti terkandung dalam konsepsi ini. Perjuangan kemerdekaan menjadi keniscayaan, dan merupakan manifestasi dari ajaran agama.⁴⁴

b. Resolusi Jihad

Resolusi jihad merupakan maklumat untuk berjihad, berperang mengusir kedatangan Inggris di bumi Indonesia yang *nota bene* sudah memproklamirkan diri sebagai bangsa yang merdeka. Situasi Surabaya yang semakin tegang dengan meningkatnya aktifitas NICA-Belanda yang membonceng tentara Inggris menjadi pertimbangan para Kyai pesantren untuk bertindak mengobarkan semangat perlawanan.

Sebelumnya, Presiden Soekarno menemui KH. Hasyim Asy'ari untuk menanyakan hukum mempertahankan kemerdekaan bagi umat Islam. Menanggapi pertanyaan tersebut, KH. Hasyim As'yari memberi jawaban tegas

⁴⁴ Masyhur Amin, *NU dan Ijtihad Politik Kenegaraannya*, (Yogyakarta: al-Amin Press, 1996), 63.

bahwa sudah jelas bagi umat Islam Indonesia untuk melakukan pembelaan terhadap tanah airnya dari bahaya dan ancaman kekuatan asing.

Secara umum, isi resolusi jihad mengisyaratkan dua kategori dalam berjihad. *Pertama, fardlu 'ain* bagi setiap orang yang berada dalam radius 94 KM dari episentrum pendudukan penjajah. Dalam Islam, fatwa *fardlu 'ain* mengimpikasikan kewajiban yang harus dijalankan bagi setiap orang yang sudah *mukallaf* (aqil baligh). *Kedua, fardlu kifayah* bagi warga yang berada di luar radius tersebut. Namun dalam kondisi tertentu dan darurat, maka bisa dinaikkan statusnya menjadi *fardlu 'ain*. *Fardlu kifayah* merupakan sebuah kewajiban yang menjadi gugur apabila sudah dilakukan oleh salah satu orang dalam sebuah daerah/komunitas.⁴⁵

Resolusi jihad mempunyai dampak yang besar bagi gerakan perlawanan terhadap Inggris di Surabaya. Puncaknya tanggal 10 November 1945, saat terjadi pertempuran super dasyat antara santri dan arek-arek Surabaya melawan militer Inggris. Momentum besar tersebut kemudian diabadikan sebagai hari pahlawan. Resolusi Jihad sebenarnya merupakan konsistensi keputusan politik terhadap konsepsi *dar al-Islam*, di mana keberadaan negara Indonesia sebagai negara Islam wajib dibela dan dipertahankan.

c. Penetapan *Wali al-Amr ad daruru bi asy-Syaukah*

Dalam konferensi Alim Ulama se-Indonesia di Cipanas Cianjur Jawa Barat tanggal 2-7 Maret 1954 ditetapkan pengangkatan Presiden Soekarno sebagai *wali al-amr al-dharuru bi al-syaukah*. Hal ini terkait dengan statement PERTI yang mempersoalkan kewenangan Menteri Agama yang pada saat itu dijabat oleh K.H. Masykur dalam pengangkatan kepala KUA sebagai wali hakim.

Dalam konstelasi hukum Islam, ketika seorang wanita tidak mempunyai wali nasab, maka pernikahannya boleh dilangsungkan melalui wali hakim. Wali hakim ditunjuk oleh pemerintah atau sultan yang sedang berkuasa (*dzu syaukah*). Dalam pandangan Kiai Pesantren, sistem negara Indonesia yang berbentuk republic meniscayakan kedudukan Presiden yang sama dengan kedudukan sultan. Dengan demikian Presiden Soekarno ditetapkan sebagai *wali al-amri* (pemegang kekuasaan) dalam keadaan darurat.⁴⁶

Hal ini dilatarbelakangi oleh pemahaman bahwa kepala negara tidak dipilih oleh ulama yang kompeten, sehingga tidak sepenuhnya memenuhi prasyarat secara fiqih. Pengangkatan Presiden sebagai *wali al-amr al-dharuri bi alsyaukah* dalam konteks ini memberi legitimasi secara fiqih, sebagai kepala negara yang diberi wewenang untuk mengurus persoalan umat. Dengan dasar

⁴⁵ Zainul Milal Bizawie, *Laskar Ulama-Santri Dan Resolusi Jihad*, (Tangerang: Pustaka Compass, 2014), 206.

⁴⁶ Ridwan, *Paradigma Politik NU: Relasi Sunni-Nu dalam Pemikiran Politik*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 67.

ini, maka kepala negara berwenang dan sah mengangkat pejabat agama melalui pendelegasian wewenang kepada Menteri Agama.

Penggunaan gelar *wali al-amr al-dharuru bi al-syaukah* ini mengandung makna implisit bahwa suatu negara yang dipimpin dengan gelar tersebut tidaklah benar-benar islami, hanya saja dipimpin oleh pemimpin yang muslim. Hal ini karena keadaan negara dianggap darurat sehingga membutuhkan fatwa para alim ulama sebagai legitimasi hukum Islam.

Latar belakang munculnya gelar ini didasarkan atas dua pertimbangan, yakni pertimbangan agama dan pertimbangan politik. Pada pertimbangan agama, konsepsi *imamah* (kepemimpinan dalam Islam) dianggap sebagai hal yang penting dan mendasar bagi kehidupan masyarakat serta dipandang perlu untuk menentukan imam (pemimpin) yang berdasar pada mekanisme hukum Islam. Sedangkan pertimbangan politik meniscayakan agar posisi Presiden Soekarno semakin kuat, mengingat ada beberapa golongan dan interest politik tertentu yang masih meragukan dan mempertanyakan posisi Presiden dalam tinjauan fiqh dan hukum Islam.⁴⁷

Ijtihad politik di atas menunjukkan bahwa kepentingan bangsa dan negara menjadi orientasi dalam berpolitik. Dalam konteks ini, fiqh menjadi dasar untuk melegitimasi realitas politik yang terjadi. Penggunaan istilah *dharuri* dalam konsepsi ini memberi gambaran yang jelas bahwa hukum fiqh harus dinamis, sesuai dengan realitas sosial yang ada serta memberi kontribusi besar dalam melakukan ijtihad politik yang dinamis dan kontekstual untuk kepentingan bangsa dan negara.

d. Nasionalisme Piagam Jakarta

Piagam Jakarta merupakan tonggak lahirnya Pancasila dan UUD 1945 sebagai dasar negara Indonesia. Piagam Jakarta yang saat ini termanifestasi dalam Pembukaan UUD 1945, sebenarnya telah mengalami perubahan yang cukup signifikan dalam dasar teologi negara Indonesia. Dalam naskah Piagam Djakarta yang asli, terdapat tujuh kata yang menjadi kontroversi dan perdebatan para *founding father*, yakni Ketuhanan yang Maha Esa dengan menjalankan syariat Islam bagi para pemeluknya.

Isu kembali kepada Piagam Djakarta sempat mengemuka pada awal-awal era reformasi. Ada sebagian kalangan yang menuntut untuk kembali kepada piagam Jakarta dalam rangka menata kembali dasar negara pada masa amandemen UUD 1945. Kalangan ini menilai kebobrokan tatanan pemerintahan orde baru karena menjadikan negara keluar dari syariat Islam dan menjadi sekuler. Namun wacana ini lambat laun meredup, dan secara sporadis termanifestasi dalam beberapa Peraturan Daerah berbasis syariah.

⁴⁷ Ridwan, *Paradigma Politik Nu: Relasi Sunni-Nu dalam Pemikiran Politik*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 233.

Penghapusan tujuh kata tersebut mempunyai dampak krusial bagi landasan ideologi bangsa. Jika tujuh kata tersebut masih termaktub, maka konsekuensinya adalah bahwa dasar negara kita berdasar pada satu agama tertentu. Padahal, masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang plural, terdapat berbagai agama yang tersebar dalam berbagai pulau dan daerah. Penghapusan tujuh kata dalam Piagam Djakarta ini adalah bentuk toleransi umat Islam yang luar biasa dalam rangka merayakan perbedaan dan kebhinekaan.

Tokoh yang mempunyai peran penting dalam meledakkan dasar negara yang bertoleran ini adalah KH. Wahid Hasyim, merupakan anggota PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia), lebih spesifiknya adalah anggota Panitia Sembilan yang bertugas merumuskan dasar negara. Dalam catatan Andree Feillard, NU mempunyai andil besar dalam penghapusan tujuh kata dalam Piagam Jakarta. Hal ini dilatarbelakangi oleh perdebatan sengit antara kelompok Islamis yang dikomandani oleh Muhammadiyah dengan kaum Kristen dan sekuler dari Indonesia Timur. Jalan tengahnya melahirkan kesepakatan *win-win solution*. Penghapusan tujuh kata dianggap kelompok Timur menghilangkan dominasi agama tertentu, namun bagi Kelompok Islam terminologi Maha Esa tetap menjadi bagian dari dasar negara.⁴⁸

Penghapusan tujuh kata dalam Piagam Jakarta sekali lagi menunjukkan komitmen kebangsaan para pendiri bangsa dalam merayakan perbedaan polemik tentang isu islamisasi dasar negara. Dalam hal ini, para ulama dan kiai pesantren sangat berperan dalam menentukan perdebatan mengenai bentuk negara Indonesia.⁴⁹

e. Penerimaan Asas Tunggal Pancasila

Pada tahun 1983, Orde Baru melalui rezim Soeharto memberlakukan asas tunggal Pancasila. Konsepsi asas tunggal Pancasila ini meniscayakan agar seluruh organisasi sosial kemasyarakatan wajib menempatkan Pancasila sebagai dasar organisasinya. Keputusan sepihak ini menuai beragam reaksi dari berbagai ormas. Sebagian besar ormas Islam menolak kebijakan tersebut, karena mayoritas ormas ini menempatkan Islam sebagai dasar dan asas organisasi.

Dalam konteks ini, KH. Abdurrahman Wahid (Gus dur) adalah kiai muda NU yang mendesain sikap politik NU sebagai organisasi Islam pertama yang menerima asas tunggal tersebut.⁵⁰ Dalam muktamar NU tahun 1984 di Situbondo, diputuskan penerimaan Pancasila sebagai asas tunggal dalam kehidupan berbangsa dan bernegara serta memutuskan Gusdur sebagai Ketua

⁴⁸ Andre Feillard, *NU Vis a Vis Negara*, (Yogyakarta: LKIS, 1999), 39.

⁴⁹ Fathurin Zen, *NU Politik: Analisis Wacana Media*, (Yogyakarta: LKIS, 2004), 32.

⁵⁰ Al-Zastrow, *Gusdur Siapa Sih Sampean? Tafsir Teoritis atas Tindakan dan Pernyataan Gusdur*, (Jakarta: Erlangga, 1999), 30.

Umum tanfidziyah sekaligus menetapkan kembalinya NU pada khittah 26. Hal ini berarti NU menarik diri dari dunia politik praktis dan kembali menjadi organisasi sosial yang mengurus masalah agama, dakwah dan sosial. Berbeda dengan beberapa organisasi Islam lainnya seperti Muhammadiyah yang harus melalui proses panjang dan perdebatan sengit dalam menyikapi kebijakan dasar tunggal pancasila, meski akhirnya sepakat menerima dasar tunggal pancasila sebagai dasar organisasi.⁵¹

Secara lebih spesifik, argumentasi penerimaan dasar tunggal Pancasila berlandaskan pada prinsip-prinsip yang tertuang dalam Keputusan Munas Alim Ulama NU No.11/MANU/1404/1983. *Pertama*, Pancasila sebagai dasar dan falsafah Negara Republik Indonesia bukanlah agama, tidak dapat menggantikan agama dan tidak dapat dipergunakan untuk menggantikan kedudukan agama. Artinya Pancasila dalam konteks bernegara merupakan pandangan hidup, dan hal ini berbeda dengan ajaran agama.

Kedua, Sila Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai dasar Negara Republik Indonesia menurut Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, yang menjwai sila-sila lain, mencerminkan nilai tauhid menurut pengertian keimanan dalam Islam. Pencantuman kata Esa mengandung nilai dasar dalam tauhid. Hal ini menjadi sila pertama dalam Pancasila, sehingga Pancasila tidak bertentangan dengan prinsip tauhid.

Ketiga, Islam adalah aqidah dan syari'ah, meliputi aspek hubungan manusia dengan Allah dan hubungan antar manusia. Pancasila merupakan prinsip dalam berhubungan dan berinteraksi sosial terhadap sesama manusia, dalam lingkup berbangsa dan bernegara. Melalui Pancasila, maka cara berakhlak sosial dapat terbangun melalui ide dasar budaya dan kearifan masyarakat.

Keempat, penerimaan dan pengamalan Pancasila merupakan perwujudan dan upaya umat Islam Indonesia untuk menjalankan syari'at agamanya. Pancasila merupakan payung yang akan mengayomi kebebasan dan menjalankan ajaran agama. Sehingga setiap orang dapat dilindungi dan dijamin haknya dalam melaksanakan ajaran agama.

Kelima, sebagai konsekuensi dari sikap di atas, Nahdlatul Ulama berkewajiban mengamankan pengertian yang benar tentang Pancasila dan pengamalannya yang murni dan konsekuen oleh semua pihak.

Penutup

Pendidikan politik adalah salah satu ragam pendidikan yang dibangun dan ditumbuhkembangkan di pondok pesantren. Dasar pendidikan politik pesantren adalah kebebasan menyampaikan pendapat, menghargai perbedaan, dan toleransi. Konstruksi bangunan pendidikan politik di pondok pesantren yang mengkondisikan

⁵¹ Budhi Munawar Rahman, *Argumen Islam untuk Sekularisme*, (Jakarta: Grasindo: 2010), 147.

para santri memahami nilai-nilai politik antara lain: 1) forum diskusi kitab kuning; 2) kajian *al-Fiqh 'alā al-Madhāhib al-Arba'ah*; 3) forum *khiṭābiyah* (orasi ilmiah); 4) praktik budaya demokrasi; 5) kajian *bath al-masāil*.

Pendidikan politik di dunia pondok pesantren menjadi salah satu tempat reproduksi calon pemimpin ideal di Indonesia. Kecakapan agama yang mempribadi pada jati diri santri dapat menjadi modal intelektual yang baik dalam menjiwai arah politik santri di masa depan. Di antara kiprah kiai & Pesantren dalam pergulatan politik dan ikut andil dalam mewarnai percaturan politik Nasional di Indonesia adalah: penetapan *Dar al-Islam*, resolusi Jihad, penetapan *wali al-Amr ad daruru bi asy-Syaukah* untuk presiden pertama RI, pembentukan Nasionalisme Piagam Jakarta, dan penerimaan Asas Tunggal pancasila.

BIBLIOGRAFI

- Abdurrahman Mas'ud dkk., *Dinamika Pesantren dan Madrasah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002).
- Abu Hamid dalam H. M Yacub, *Pondok Pesantren dan Pembangunan Masyarakat Desa*, (Bandung: Angkasa, 1993).
- Abuddin Nata (editor), *Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan Lembaga-lembaga Pendidikan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Grasindo, 2001).
- Aljabiri, Muhammad Abid, *Agama, Negara, dan Penerapan Syariah*, terj. Mujiburrahman, (Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru, 2001).
- Al-Jawi, M. Shiddiq, "Bughat (pemberontak) dalam Khazanah Fiqih Islam," n.d., www.fiqihunikabogor.com.
- Al-Zastrow, *Gusdur Siapa Sih Sampean? Tafsir Teoritis atas Tindakan dan Pernyataan Gusdur*, (Jakarta: Erlangga, 1999).
- Amin, Masyhur, *NU dan Ijtihad Politik Kenegaraannya*, (Yogyakarta: al-Amin Press, 1996).
- Amirullah, "Hubungan Islam, dan Politik di Indonesia Serta Implikasinya Terhadap Pendidikan Islam," *Jurnal Kreatif*, XII, no. 1, Januari 2015.
- Arfiansyah, "Pemikiran Politik Islam; Sebuah Tinjauan Sejarah Terhadap Arus Pemikiran Islam Klasik Sampai Awal Abad Ke 20," *jurnal SUBSTANTIA*, 12, Oktober 2010.
- Asril, Sabrina, "Mendagri: 343 Kepala Daerah Tersangkut Kasus Hukum," *Kompas.com*, 4 Februari 2015.
- Azra, Azyumardi, "Revitalisasi Islam Politik dan Islam Kultural di Indonesia," *Indo-Islamika*, 1, Februari, 2012.

Kiprah Kiai & Pesantren Dalam Pergulatan Politik Nasional Di Indonesia

- Azra, Azyumardi, *Esai-Esai Intelektual Muslim Pendidikan Islam*, (Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 1999).
- Bizawie, Zainul Milal, *Laskar Ulama-Santri Dan Resolusi Jihad*, (Tangerang: Pustaka Compass, 2014).
- Chalik, Abdul, "Fundamentalisme dan Masa Depan Ideologi Politik Islam," *Jurnal Islamica Junal Studi Keislaman*, Juli 2018.
- Chasbullah, KH. Wahab, "Syirkatul 'Inan Murabathoh Nadlatul Tujjar," dalam Kumpulan Tulisan Majma' Buhuts An-Nahdliyyah (Forum Kajian Ke-Nu-An) (Pati: Majma' Buhuts AnNahdliyah, 2014).
- Dauly, Haedar Putra, *Historisitas dan Eksistensi Pesantren, Sekolah dan Madrasah*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2001).
- Dhofier, Zamakhsyari, *Tradisi Pesantren: Studi Tentang Pandangan Hidup Kyai*, (Jakarta: LP3ES, 1985).
- Ensiklopedi Islam*, Jilid 3, (Jakarta : Ikhtiar Baru Van Hoeve, 2000).
- Fananie, Husnan Bay, *Modernism in Islamic Education in Indonesia and India ; A Case Study of The Pondok Pesantren Modern Gontor and Algarh*, (Nedherlad: Leiden University, 1998).
- Feillard, Andre, *NU Vis a Vis Negara*, (Yogyakarta: LKIS, 1999).
- Greg Fealy dan Greg Barton, *Tradisionaisme Radikal Persinggungan Nahdlatul Ulama-Negara*, (Yogyakarta: LKiS, 2010).
- Hasil Bahtsul Masail Mukhtamar NU ke-33 di Jombang, Bahtsul Masail, 24 Agustus 2015, santri.net.
- Ismail, Fatah, *Dinamika Pesantren dan Madrasah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002).
- M. Arkoun dan Louis Gardet, *Islam Kemarin, dan Hari Esok*, terj. Mujiburrahman, (Bandung: Penerbit Pustaka, 1997).
- Madjid, Nurcholis, *Bilik-bilik Pesantren*, (Jakarta: Paramadina, 1997).
- Marzuki Wahid dkk, *Pesantren Masa Depan*, (Bandung: Pustaka Hidayah, 1999), 90.
- Mukodi, *Menjaga Umat Pilar-Pilar Budaya Pondok Tremas di Era Global*, (Yogyakarta: Lentera Kresindo, 2015).
- Mukodi, *Studi Fenomenologi Budaya Pondok Tremas di Era Globalisasi*, (Universitas Negeri Yogyakarta, 2014).
- Mulkhan, Abdul Munir, *Runtuhnya Mitos Politik Santri Strategi Kebudayaan dalam Islam*, (Yogyakarta: Sipress, 1999).

